

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anwar, Khoirul 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bardach, Eugene. 1977. *The Implementation Game*. Cambridge: MIT Press
- Bogdan dan Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Burhan. 2008. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Edwards III ,G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C Elfabeta.
- Grindle, Merille S. (ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third Implementation Process*. USA: Sage Publication. Inc.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004 *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi)* Yogyakarta
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E-Government In Action*. Yogyakarta: Offset. Indrajit,
- Richardus Eko. 2004. *E-Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses diberbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi.
- Mazmanian, Daniel H, and Sabatier, Paul. A. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York : Harpers Collins.
- Moleong, Lexy J, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Oktasari. 2015 . *Teori implementasi kebijakan*. (Jurnal Universitas Medan Area)
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung:
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Van Metter, Donald. A and Van Horn, Carl. E. 1975. *The Policy*
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi.(2008).*Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Medi

Presindo

World Bank, 2002. *New-Economy Sector Study, Electronic Government and Governance: Lesson for Argentina*.

### **Jurnal**

- Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016). Penerapan *E-Government* Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No.2016*
- Ariyanto, M., Widyastuti, Y., & Haris, D. M. (2015). *ANALISIS PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG (Studi Pada Pelayanan e-Registration, e-SPT, dan e-Filing)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Inayah, R. N., & Yulianti, R. (2010). *Implementasi E-Government di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Karniawati, N., & Rahmadani, R. (2011). Analisis Kebijakan Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)(Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh implementasi kebijakan e-government terhadap kinerja aparatur kota cimahi. *Sosiohumaniora*, 15(1), 6-14

### **Rujukan Elektronik :**

- Adani, R. 2020. *Pengenalan Apa Itu Website Beserta Fungsi, Manfaat dan Cara Membuatnya*. Melalui <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-website/> [2/5/23].
- Faradilla A. 2022. *Apa Itu Website? Pengertian Website dan Jenisnya*. Melalui <https://www.hostinger.co.id/tutorial/website-adalah> [3/5/23]  
<https://bkd.jabarprov.go.id> (diakses pada tanggal 5/5/23]

### **Dokumen-dokumen :**

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika

(Telekomunikasi, Media dan Informatika)

Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 26 tahun 2022 tentang sistem informasi  
aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Pemerintah, 2019) tentang  
Perubahan kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977  
tentang Peraturan Gaji PNS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara